Penandaan Batas Areal Perhutanan Sosial Dengan Pendekatan Partisipatif Pada Desa Ilanbatu Uru Kabupaten Luwu

Amiruddin Akbar Fisul¹ dan Didiharyono²

¹ Email: amiruddinakbarfisu07@gmail.com
Universitas Andi Djemma

² Email: muh.didih@gmail.com
Universitas Andi Djemma

Abstrak. Para masyarakat yang tergabung dalam kelompok perhutanan di Desa Ilanbatu Uru memiliki masalah terhadap lahan yang mereka kelola pada saat ini. Tidak adanya batas spasial yang jelas antara Kawasan hutan dan wilayah perhutanan sosial yang dapat mereka kelola membuat petani mengekspansi hutan karena ketidaktahuan mereka. Maksud kegiatan Penandaan Batas Areal Kerja HPHD Ilanbatu Uru adalah membantu masyarakat untuk memberikan batas-batas fisik berupa plat batas pada areal kerja HPHD sesuai dengan SK Penetapannya serta mensosialisasikan/ mengumumkan batas-batas dimaksud kepada masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah dalam rangka terwujudnya kepastian hukum mengenai status, batas, luas dan letak wilayah areal kelola. Metode yang digunakan pada kegiatan ini yaitu menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah dan perguruan tinggi. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan Batasan wilayah kelola, sehingga masyarakat dapat diberikan kepercayaan dalam memanfaatkan potensi yang ada mulai dari pengidentifikasian masalah, menilai, dan memformulasikan permasalahannya. Dengan kegiatan ini pula dapat meminimalisir pembalakan liar pada wilayah hutan lindung di Desa Ilanbatu Uru Kabupaten Luwu.

Kata Kunci: Perhutanan sosial, pemetaan partisipatif.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan perhutanan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/Menlhk /Setjen/OTL.O/I/2016. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan kawasan perhutanan sosial, pengembangan usaha dan kemitraan serta pemetaan konflik di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan merupakan penjabaran dari RPJM Nasional Tahun 2015-2019 serta Renstra Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam target kinerja. Adapun target kinerja Ditjen PSKL meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat, meningkatnya upaya penyelesaian konflik dan tenurial di kawasan hutan dan meningkatnya perilaku peduli lingkungan dan kehutanan. Untuk itu pemerintah telah men-targetkan alokasi kawasan hutan seluas 12,7 juta ha untuk dikelola masyarakat,

melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial bahwa salah satu kewajiban bagi pemegang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR adalah memberi tanda batas areal kerjanya. Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut dapat dibantu oleh Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) atau pihak lain yang tidak mengikat. Namun dalam hal areal ijin perhutanan sosial berada pada batas luar atau batas fungsi kawasan pemberian tanda batas dilaksanakan oleh UPT yang membidangi pemantapan kawasan hutan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan).

Dalam rangka pelaksanaan perhutanan sosial di lapangan supaya program tercapai dengan aman dan tepat sasaran, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan kegiatan fasilitasi berupa fasilitasi pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar.

Penataan batas luar dan fungsi kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan berdasarkan Permenhut Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan secara teknis diatur dalam Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P. 3/PKTL/SEKIDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan. Namun terkait batas areal sendiri (bukan batas luar maupun batas fungsi) belum ada aturan yang mengatur pelaksanaannya.

Terkait pemenuhan kewajiban pemberian tanda batas bagi pemegang HD, HKm dan HTR, dalam hal ini batas sendiri, sesuai dengan Perdirjen PSKL Nomor : P. 16/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan RPHD, RKU-IUPHKm dan RKU-IUPHHKHTR dijelaskan bahwa penandaan batas areal HKm, HD dan HTR dilakukan dengan alat ukur kompas, meteran atau Global Positioning System (GPS) dengan tanda batas yang mudah di dapat dan dikenali dilapangan. Metode pelaksanaan teknis penataan batas dengan menggunakan GPS merupakan metode penentuan posisi yang relatif mudah dengan ketelitian yang relatif tinggi serta mengacu pada suatu sistem referensi global.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan ini yaitu menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat dan kelompok tani, polisi hutan, pemerintah desa, Kementerian Kehutanan dan kami sebagai akademisi dalam proses pemetaan penandaan tapal batas perhutanan sosial. Kegiatan partisipatif diyakini dapat menambah pemahaman warga tentang urgensi wilayah kehutanan ini amat penting, sehingga masyarakatlah yang seharusnya diberikan kepercayaan dalam melaksanakan kegiatan ini, sementara kami memfasilitasi, membantu dan memberi pengarahan kepada masyarakat.

Pendekatan partisipatif seharusnya dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pemecahan masalah (Fisu dan Marzaman, 2018). Pentingnya metode partisipatif secara berkelanjutan agar dapat berbagi informasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya (Asnuddin, 2010). Pemahaman warga akan masalah dan potensi yang mereka miliki amat penting, sehingga masyarakatlah yang seharusnya diberikan kepercayaan dalam menyelesaikan masalah dan memanfaatkan potensi yang ada (Marzaman dkk, 2019).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum melaksanakan kegiatan tata batas, terlebih dahulu dilakukan FGD pada Kantor Desa Ilanbatu Uru dengan membicarakan persiapan peralatan terutama kelayakan alat ukur maupun alat pendukung lainnya. Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan adalah persiapan alat dan bahan sebagai berikut :

- Peta Kerja dan Pedoman Tata Batas;
- Surat-surat yang dipersiapkan meliputi Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Pengantar, Surat Permintaan Bantuan Tenaga dan lain-lain;
- Alat tulis menulis, camping unit, obat-obatan dan bahan/alat lainnya yang diperlukan di lapangan;
- Receiver GPS beserta pelengkapannya;
- Koordinasi dengan BPKH dan dinas kehutanan lokasi penataan batas;
- Pertemuan dengan kelompok dan Pemerintah desa tentang informasi awal lokasi dan batas-batas areal ijin perhutanan sosial serta batas untuk masing-masing kelompok dalam areal ijin.

Gambar 1. Pelaksanaan FGD

Tim pelaksana terdiri dari pelaksana sebanyak tiga orang yang merupakan kelompok tani dan masyarakat pengelola perhutanan social dan juga personil dari pemegang hak pengelolaan atau Izin Usaha Pemanfaatan atau Pemohon Perhutanan Sosial. Pelaksana ini memiliki tugas menyusun perencanaan pembuatan peta kerja penandaan batas; melaksanakan penandaan batas di lapangan sesuai dengan peta kerja dan ketentuan teknis pengukuran dan pemetaan; membuat laporan, berita acara dan peta hasil penandaan batas areal kerja; dan menandatangani laporan kegiatan, berita acara dan peta penandaan batas areal kerja.

Tim pelaksana berikutnya merupakan pendamping yaitu personil yang memiliki kompetensi pemetaan wilayah yang berasal dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Penyuluh, Perguruan Tinggi atau petugas yang ditunjukoleh Kepala Balai, dengan tugas membantu menyusun perencanaan dan pembuatan peta kerja penandaan batas; melakukan bimbingan teknis pelaksanaan penandaan batas di lapangan; membimbing dan membantu penyusunan laporan dan peta hasil penandaan batas sesuai kaidah-kaidah dan peraturan di bidang kehutanan; dan menandatangani berita acara dan peta penandaan batas areal kerja.

Selain itu juga terdapat saksi-saksi yaitu personil yang berasal dari Desa dan Kecamatan serta disarankan juga melibatkan saksi dari tokoh/pemuka masyarakat dan petugas dari KPH, dengan tugas memberikan kesaksian bahwa pelaksanaan penandaan batas telah dilaksanakan dengan benar dan secara partisipatif melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terkait; ikut menyaksikan proses pelaksanaan penandaan batas di lapangan; dan juga menandatangani laporan kegiatan, berita acara dan peta penandaan batas areal kerja.

Pekerjaan lapangan dimulai dengan membuat rintis batas. Pembuatan rintis batas adalah pekerjaan menebas semak belukar ke arah dalam areal kelola, dengan lebar rintis batas yang dibuat ± 1 (satu) meter dan tampak jelas di lapangan, sehingga dapat digunakan sebagai jalan inspeksi/pemeriksaan dan keperluan pengamanan batas hutan. Adapun teknis pelaksanaan tanda batas seperti yang diuraikan di bawah ini:

a) Plat batas.

- 1) Pemasangan plat batas dilaksanakan pada areal kelola ijin Perhutanan Sosial (HKm/HD/HTR) yang merupakan tata batas sendiri (bukan tata batas luar atau tata batas fungsi).
- 2) Pemasangan plat batas dipasang pada titik-titik ukur sesuai dengan yang direncanakan pada peta kerja sepanjang trayek batas areal kelola dengan jarak antar pal adalah ± 100 meter dan diusahakan pada tempat yang strategis atau di titik belok batas areal kerja.
- 3) Plat batas areal kelola terbuat dari plat seng dengan ukuran 30 cm x 20 cm berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam, kemudian dipasang pada patok kayu (gambar terlampir).

b) Penomoran Plat batas

- 1) Plat seng dipasang menghadap keluar areal kelola Perhutanan Sosial (HKm/HD/HTR).
- 2) Plat seng dituliskan huruf singkatan sesuai pola perhutanan sosial yang bersangkutan dan ditambahkan nama kelompok.

Misalnya : HD (= Hutan Desa), HKm (= Hutan Kemasyarakatan), HTR (= Hutan Tanaman Rakyat) + Rimba Lestari (Nama Kelompok).

- 3) Pemberian nomor dilakukan secara berurutan mulai dari angka 1 searah putaran jarum jam pada batas areal kerja yang ditata batas.

c) Pengukuran Batas

- 1) Pengukuran batas dilakukan dengan menggunakan GPS dan didukung dengan kompas.
- 2) Sebelum kegiatan pengukuran batas dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan kalibrasi GPS, yaitu :
 - Kalibrasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi lokasi yang baru.
 - Kalibrasi dilakukan terhadap Kompas GPS dan Altimeter GPS.
- 3) Penentuan titik ikat di lapangan dilakukan dengan pengambilan koordinat titik pasti/ titik kontrol/ titik markant sesuai dengan peta kerja.
- 4) Penentuan titik awal dilakukan dengan pengukuran garis ikatan dengan sistem navigasi sesuai azimuth dan jarak pada peta kerja/instruksi kerja.
- 5) Pengukuran batas areal kerja dilakukan dengan pengambilan koordinat pada setiap titik ukur dengan jarak ± 100 meter dan pada setiap tanda batas (plat batas).

Gambar 2. Pelat Batas

Gambar 3. Pelaksanaan Penandaan Pelat batas

Pembuatan Peta

Hasil dari download data GPS yang menggunakan metode *differential positioning* dituangkan ke dalam peta hasil tata batas areal kerja sebagai lampiran Berita Acara Tata Batas. Peta hasil tata batas tersebut dilengkapi dengan layer sungai, jalan, garis pantai, garis kontur dan informasi lainnya yang bersumber dari Peta Rupa Bumi Indonesia skala terbesar yang tersedia di lokasi kawasan hutan yang ditata batas. Data/peta dasar pada wilayah tata batas dipetakan secara utuh, tidak hanya potongan garis di sekitar trayek batas. Pada Berita Acara Tata Batas untuk uraian pengukuran batas areal kerja dengan mencantumkan nomor tanda batas, koordinat dan jarak.

Hasil Pelaksanaan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Penandaan Batas Areal Kerja HPHD Ilanbatu Uru yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Penandaan Batas Sederhana HPHD Ilanbatu Uru dan peta sebagai lampirannya dengan hasil sebagai berikut :

1. Penandaan Batas dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 21 Desember tahun 2018, pada wilayah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang pelaksanaannya terdiri dari 3 (tiga) orang Pelaksana, 2 (dua) orang Pemdamping serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari Desa.
2. Hasil pemasangan tanda batas di lapangan sesuai Peta Kerja, yaitu :
 - a. Dalam menentukan titik batas awal (T0) berada pada koordinat geografis menggunakan receiver GPS, yaitu pada Lintang 2°50'03,248"S dan Bujur Timur 119°58'49,055" BT
 - b. Terdapat perubahan/ pergeseran beberapa titik awal pada lokasi penandaan batas. Hal ini dengan mempertimbangkan lokasi medan yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan HD, serta masukan dari warga dan tokoh masyarakat setempat. Titik-titik tersebut yaitu titik 1, 2, 3, 7, 13, 15, 16, 22, 23,24, dan titik 61 dengan rentang pergeseran dari awal antara 23 meter hingga 61 meter.
 - c. Titik-titik batas areal kerja setelah dilakukan pemasangan tanda batas adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Koordinat Hasil Penandaan Plat batas

Plat Batas	Trayek	Koordinat Geografis		Koordinat UTM		Jarak Datar	Pergeseran
		X	Y	x_utm	y_utm		
1	Titik 1 - 2	119° 58' 49,055" E	2° 50' 03,248" S	164252	9686295	94,16	23
2	Titik 2 - 3	119° 58' 47,661" E	2° 50' 00,661" S	164228	9686387	99,50	42
3	Titik 3 - 4	119° 58' 47,299" E	2° 49' 57,436" S	164238	9686486	94,79	61
4	Titik 4 - 5	119° 58' 46,325" E	2° 49' 54,843" S	164173	9686555	97,67	23
5	Titik 5 - 6	119° 58' 44,940" E	2° 49' 52,318" S	164107	9686627	100,18	
6	Titik 6 - 7	119° 58' 43,477" E	2° 49' 49,437" S	164061	9686716	65,19	
7	Titik 7 - 8	119° 58' 41,005" E	2° 49' 49,289" S	164018	9686765	71,09	56

Plat Batas	Trayek	Koordinat Geografis		Koordinat UTM		Jarak Datar	Pergeseran
		X	Y	x_utm	y_utm		
8	Titik 8 - 9	119° 58' 39,212" E	2° 49' 48,271" S	163929	9686751	69,01	
9	Titik 9 - 10	119° 58' 36,972" E	2° 49' 45,944" S	163860	9686822	99,25	
10	Titik 10 - 11	119° 58' 34,873" E	2° 49' 43,526" S	163795	9686897	98,29	
11	Titik 11 - 12	119° 58' 32,631" E	2° 49' 41,281" S	163725	9686966	98,35	
12	Titik 12 - 13	119° 58' 31,588" E	2° 49' 38,223" S	163693	9687059	100,28	
13	Titik 13 - 14	119° 58' 30,433" E	2° 49' 35,192" S	163677	9687158	96,24	21
14	Titik 14 - 15	119° 58' 30,064" E	2° 49' 31,927" S	163645	9687253	103,40	
15	Titik 15 - 16	119° 58' 27,814" E	2° 49' 29,283" S	163605	9687344	97,50	31
16	Titik 16 - 17	119° 58' 26,151" E	2° 49' 26,592" S	163553	9687430	91,70	33
17	Titik 17 - 18	119° 58' 24,840" E	2° 49' 23,860" S	163483	9687501	99,62	
18	Titik 18 - 19	119° 58' 22,975" E	2° 49' 21,207" S	163425	9687582	97,94	
19	Titik 19 - 20	119° 58' 20,288" E	2° 49' 19,492" S	163342	9687634	100,44	
20	Titik 20 - 21	119° 58' 18,433" E	2° 49' 16,831" S	163284	9687716	99,85	
21	Titik 21 - 22	119° 58' 16,829" E	2° 49' 14,014" S	163235	9687803	99,98	
22	Titik 22 - 23	119° 58' 14,397" E	2° 49' 11,492" S	163184	9687889	100,02	28
23	Titik 23 - 24	119° 58' 11,817" E	2° 49' 8,923" S	163123	9687967	113,39	44
24	Titik 24 - 25	119° 58' 10,372" E	2° 49' 6,635" S	163079	9688055	70,04	54
25	Titik 25 - 26	119° 58' 8,700" E	2° 49' 5,149" S	162982	9688075	98,49	
26	Titik 26 - 27	119° 58' 5,786" E	2° 49' 3,826" S	162892	9688115	99,25	
27	Titik 27 - 28	119° 58' 3,346" E	2° 49' 1,714" S	162817	9688180	99,70	
28	Titik 28 - 29	119° 58' 1,088" E	2° 48' 59,401" S	162747	9688251	99,62	
29	Titik 29 - 30	119° 57' 58,470" E	2° 48' 57,494" S	162666	9688309	100,44	
30	Titik 30 - 31	119° 57' 55,844" E	2° 48' 55,607" S	162584	9688367	99,30	
31	Titik 31 -32	119° 57' 52,786" E	2° 48' 54,558" S	162490	9688399	99,74	
32	Titik 32 -33	119° 57' 49,883" E	2° 48' 53,135" S	162400	9688442	84,40	
33	Titik 33 -34	119° 57' 47,687" E	2° 48' 51,528" S	162332	9688492	99,50	
34	Titik 34 -35	119° 57' 47,393" E	2° 48' 48,294" S	162322	9688591	98,67	
35	Titik 35 -36	119° 57' 46,404" E	2° 48' 45,244" S	162292	9688685	97,41	
36	Titik 36 -37	119° 57' 45,384" E	2° 48' 42,240" S	162260	9688777	100,00	
37	Titik 37 -38	119° 57' 45,409" E	2° 48' 38,993" S	162260	9688877	99,85	
38	Titik 38 -39	119° 57' 45,829" E	2° 48' 35,768" S	162273	9688976	99,85	
39	Titik 39 -40	119° 57' 46,264" E	2° 48' 32,551" S	162286	9689075	99,69	
40	Titik 40 -41	119° 57' 47,005" E	2° 48' 29,387" S	162309	9689172	93,64	

Plat Batas	Trayek	Koordinat Geografis		Koordinat UTM		Jarak Datar	Pergeseran
		X	Y	x_utm	y_utm		
41	Titik 41 -42	119° 57' 45,983" E	2° 48' 26,549" S	162277	9689260	54,57	
42	Titik 42 -43	119° 57' 47,691" E	2° 48' 26,105" S	162330	9689273	100,02	
43	Titik 43 -44	119° 57' 50,925" E	2° 48' 26,174" S	162430	9689271	100,00	
44	Titik 44 -45	119° 57' 54,159" E	2° 48' 26,243" S	162530	9689270	100,02	
45	Titik 45 -46	119° 57' 57,393" E	2° 48' 26,312" S	162630	9689268	100,02	
46	Titik 46 -47	119° 58' 0,627" E	2° 48' 26,380" S	162730	9689266	100,02	
47	Titik 47 -48	119° 58' 3,862" E	2° 48' 26,449" S	162830	9689264	98,84	
48	Titik 48 -49	119° 58' 7,002" E	2° 48' 27,089" S	162927	9689245	99,62	
49	Titik 49 -50	119° 58' 10,087" E	2° 48' 28,067" S	163022	9689215	100,58	
50	Titik 50 -51	119° 58' 13,172" E	2° 48' 29,045" S	163118	9689185	100,17	
51	Titik 51 -52	119° 58' 15,909" E	2° 48' 30,772" S	163203	9689132	99,86	
52	Titik 52 -53	119° 58' 18,633" E	2° 48' 32,526" S	163287	9689078	99,32	
53	Titik 53 -54	119° 58' 21,357" E	2° 48' 34,279" S	163371	9689025	100,70	
54	Titik 54 -55	119° 58' 24,081" E	2° 48' 36,033" S	163456	9688971	99,86	
55	Titik 55 -56	119° 58' 26,805" E	2° 48' 37,787" S	163540	9688917	99,85	
56	Titik 56 -57	119° 58' 29,611" E	2° 48' 39,400" S	163627	9688868	100,65	
57	Titik 57 -58	119° 58' 32,472" E	2° 48' 40,917" S	163716	9688821	99,30	
58	Titik 58 -59	119° 58' 35,334" E	2° 48' 42,434" S	163804	9688775	100,18	
59	Titik 59 -60	119° 58' 38,195" E	2° 48' 43,951" S	163893	9688729	99,76	
60	Titik 60 -61	119° 58' 41,057" E	2° 48' 45,468" S	163981	9688682	100,18	
61	Titik 61 -62	119° 58' 44,800" E	2° 48' 45,907" S	164070	9688636	113,16	42
62	Titik 62 -63	119° 58' 46,297" E	2° 48' 49,147" S	164144	9688570	117,72	
63	Titik 63 -64	119° 58' 48,540" E	2° 48' 51,490" S	164213	9688498	100,42	
64	Titik 64 -65	119° 58' 50,784" E	2° 48' 53,833" S	164283	9688426	99,72	
65	Titik 65 -66	119° 58' 53,027" E	2° 48' 56,176" S	164352	9688354	95,13	
66	Titik 66 -67	119° 58' 53,657" E	2° 48' 59,210" S	164372	9688261	100,08	
67	Titik 67 -68	119° 58' 53,779" E	2° 49' 2,460" S	164376	9688161	100,08	
68	Titik 68 -69	119° 58' 53,902" E	2° 49' 5,710" S	164380	9688061	100,08	
69	Titik 69	119° 58' 54,024" E	2° 49' 8,960" S	164384	9687961		

3. Rintis batas dibuat selebar ± 1 meter yang menghubungkan satu titik dengan titik berikutnya dengan keseluruhan panjang batas lebih kurang 6.607 meter .

4. Titik-titik batas. Titik-titik batas berupa plat seng dengan memberikan kode inisial HPHD Ilanbatu Uru 1, HPHD Ilanbatu Uru 2, ..., dst sebanyak 69 (enam puluh sembilan) buah.
5. Batas Areal Kerja HPHD Ilanbatu Uru meliputi :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lempepasang dan desa lamasi Ulu
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun ponganan, Dusun Paranta, dan Dusun Bilolo
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Paongan dan Dusun Bilolo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tokarondang dan Dusun kampung Baru
6. Peralatan yang digunakan adalah receiver GPS merk Garmin type etrex 10

SIMPULAN DAN SARAN

Dengan melakukan penandaan tapal batas perhutanan sosial menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh masyarakat dalam proses penandaan, akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran warga akan Batasan wilayah kelola yang boleh dikelola oleh kelompok tani dan masyarakat, sehingga masyarakatlah yang seharusnya diberikan kepercayaan dalam menyelesaikan masalah dan memanfaatkan potensi yang ada mulai dari pengidentifikasian masalah; menilai dan memformulasikan permasalahannya. Dengan kegiatan ini pula dapat meminimalisir pembalakan liar pada wilayah hutan lindung di Desa Ilanbatu Uru Kabupaten Luwu. Adapun saran yang diberikan kepada masyarakat yaitu agar bisa menjaga, melindungi, dan memanfaatkan potensi hutan dengan baik dan tidak merusak lingkungan. Marilah kita jaga dan merawat lingkungan kita, demi terciptanya lingkungan yang sehat untuk kebaikan kehidupan manusia saat sekarang dan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisur, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1): 177 – 186
- Asnuddin, Andi. (2010). Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Smartek Vol.8 No.3 2010* (182 – 190)
- Dani, A. A. H., & Apriyanto, A. (2019). Penandaan Batas Area Perhutanan Sosial pada Desa Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu. *To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 30-37.
- Fisur, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). PEMETAAN PARTISIPATIF KAMPUNG PESISIR KELURAHAN TALLO KOTA MAKASSAR. *To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Marzaman LU, Hafid Z, Fisur AA. & Nurhijrah. (2019). Merajut Cerita di Kota Tua (Revitalisasi Kawasan Ex Pasar Lama Palopo). <https://doi.org/10.31227/osf.io/zmy4e>
- Muljono, P. (2009). Kinerja Aspek Sosial dalam Pengelolaan Hutan Alam Lestari: Studi Kasus pada HPH PT. Sumalindo Lestari Jaya (SLJ) II Provinsi Kalimantan Timur. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(3).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P. 14/Menlhk/Setjen/OTL.O/I/2016

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No: P.3/PKTL/SEKDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan

Peraturan Ditjen PSKL Nomor : P. 16/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan RPHD, RKU-IUPHKm dan RKU-IUPHHKHTR.

Zulevi, X. F., & Adiwibowo, S. (2018). Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 13-28.